

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia saat ini tengah menghadapi berbagai masalah kesejahteraan sosial yang sangat membutuhkan perhatian secara sungguh-sungguh. Upaya penanganannya dengan memfokuskan pada peningkatan peran tiga unsur, yaitu pemerintah, masyarakat serta dunia usaha. Adapun keterlibatan masyarakat dalam penanganan masalah sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan wujud memperkuat peran masyarakat sipil pada pencapaian cita-cita bangsa untuk mencapai taraf kesejahteraan sosial yang diinginkan.<sup>1</sup>

Salah satu masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi adalah kemiskinan. Berdasarkan hasil Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2020 mencapai 26,42 juta orang. Dibandingkan September 2019, jumlah penduduk miskin meningkat 1,63 juta orang. Jika dibandingkan dengan Maret 2019, jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 1,28 juta orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2020 tercatat sebesar 9,78 %, meningkat 0,56 % poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37% poin terhadap Maret 2019.<sup>2</sup>

Masih tingginya tingkat kemiskinan di atas dirasakan oleh semua kalangan masyarakat bawah, terutama masyarakat di pedesaan. Permasalahan kemiskinan

---

<sup>1</sup>Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2017), hal. 3.

<sup>2</sup>Badan Pusat Statistik, "Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020", *Berita Resmi Statistik*, No. 56/07/Th.XXIII, 15 Juli 2020, hal. 2.

berdampak pada kesejahteraan masyarakat bawah ini. Kemiskinan yang timbul mengakibatkan tidak berkembangnya perekonomian secara aktif. Peluang kerja sangat minim karena tidak adanya usaha mikro masyarakat sebagai salah satu solusi pengentasan kemiskinan.

Selain itu, peran pemerintahan desa tampak masih kurang maksimal dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan. Banyak pemerintahan desa hanya menjalankan program pengentasan kemiskinan dari pemerintah pusat melalui program Bantuan Non Tunai (Bantuan Sembako), BST (Bantuan Sosial Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan). Namun, realitasnya masih banyak masyarakat pedesaan yang belum sejahtera dengan adanya program-program bantuan dari pemerintah ini. Faktanya, baik upaya dari pemerintahan desa maupun para pekerja sosial belum bias mengentaskan kemiskinan ditingkat pedesaan. Hal ini tentu saja melahirkan banyak pertanyaan bagaimana sebenarnya peran yang dimainkan oleh pihak desa dan pekerja sosial dalam menurunkan tingkat kemiskinan di pedesaan dan mengapa upaya mereka sejauh ini masih jauh dari harapan.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah penelitian ini yang berhubungan dengan pekerja sosial masyarakat (PSM) dalam pemberdayaan masyarakat kurang mampu di Desa Cimekar, Kabupaten Bandung, sebagai berikut:

1. Apa peran pekerja sosial masyarakat (PSM) dalam upaya pemberdayaan masyarakat kurang mampu di Desa Cimekar?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh peran pekerja sosial masyarakat (PSM) dalam pemberdayaan masyarakat kurang mampu di Desa Cimekar?
3. Bagaimana dampak upaya pemberdayaan pekerja sosial masyarakat (PSM) terhadap kesejahteraan masyarakat kurang mampu di Desa Cimekar?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran pekerja sosial masyarakat (PSM) dalam pemberdayaan masyarakat kurang mampu di Desa Cimekar;
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat terhadap upaya pemberdayaan oleh pekerja sosial masyarakat (PSM) dalam pemberdayaan masyarakat kurang mampu di Desa Cimekar; dan
3. Untuk mengetahui dampak upaya pemberdayaan pekerja sosial masyarakat (PSM) terhadap kesejahteraan masyarakat kurang mampu di Desa Cimekar.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Kegunaan Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Kesejahteraan Sosial, khususnya tentang pekerja sosial masyarakat (PSM) sebagai salah satu Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan kegiatan-kegiatan untuk menangani masyarakat kurang mampu.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan yang dapat memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat, dan khususnya bagi mahasiswa jurusan Sosiologi tentang peran pendampingan pemberdayaan oleh pekerja sosial masyarakat (PSM). Bagi dinas sosial dan pemerintah desa, penelitian ini berguna sebagai bahan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja pekerja sosial masyarakat (PSM).

### **1.5. Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian ini, permasalahan yang hendak dikaji adalah peran pekerja sosial masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat kurang mampu di Desa Cimekar. Untuk memahami permasalahan ini, diperlukan suatu kerangka pemikiran yang mampu menjelaskan apa peran pekerja sosial masyarakat dalam upaya memberdayakan masyarakat berupa suatu teori yang relevan untuk membahas tentang peran pekerja sosial masyarakat ini.

Karena itu, penulis menggunakan teori peran (*role*) sebagai kerangka teoritis yang tepat bagi penelitian ini. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yaitu seseorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya.<sup>3</sup> Peran menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan yang diberikan masyarakat kepadanya. Pentingnya peran adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peran menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.

---

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hal. 212.

Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peran-peran individu dalam masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.<sup>4</sup>Sedangkan dalam Kamus Sosiologi, peran (*role*) adalah (a) aspek dinamis dari kedudukan, (b) perangkat hak-hak dan kewajiban, (c) perilaku aktual dari pemegang kedudukan, dan (d) bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang. Lembaga-lembaga kemasyarakatan merupakan bagian masyarakat yang banyak menyediakan peluang-peluang untuk melaksanakan peran.<sup>5</sup>

Secara sosiologis, peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, maka dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.<sup>6</sup>

Dari penjelasan tentang teori peran di atas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Diterapkan dalam konteks penelitian ini, khususnya dihubungkan dengan upaya pemberdayaan PSM, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban

---

<sup>4</sup>Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, hal. 213.

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), hal. 440.

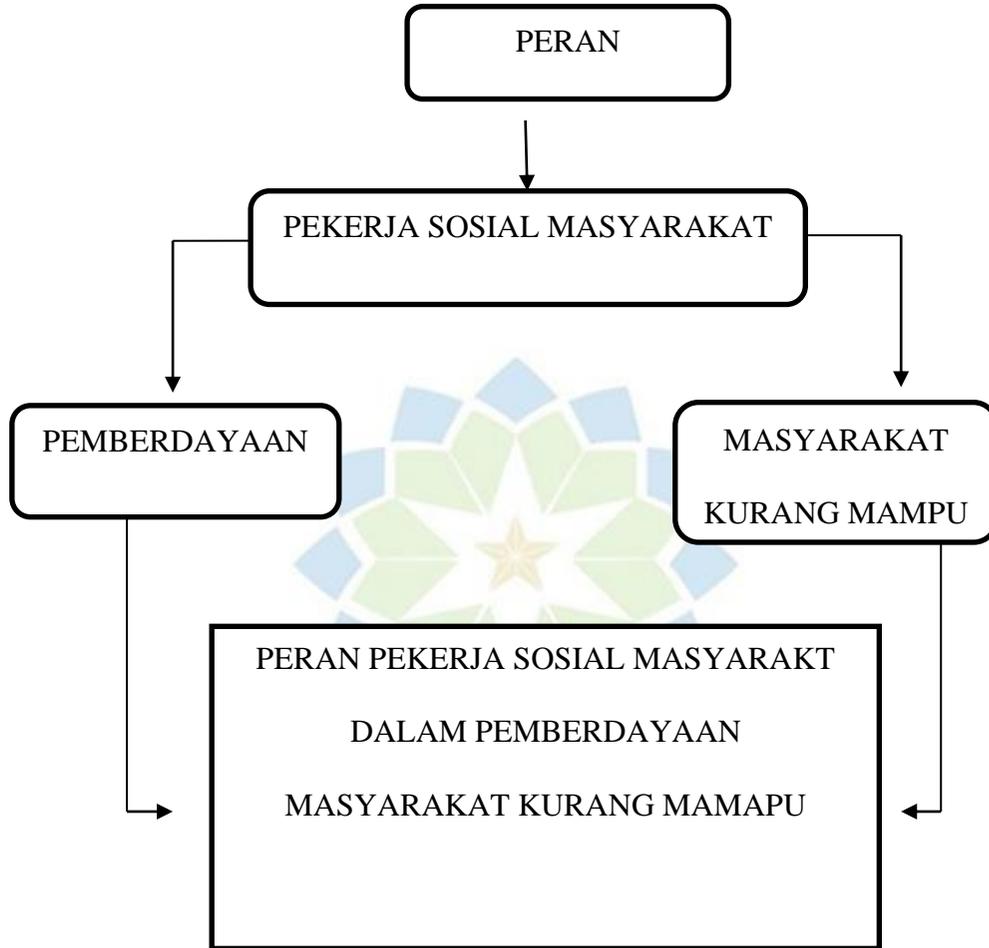
<sup>6</sup>Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, hal. 213.

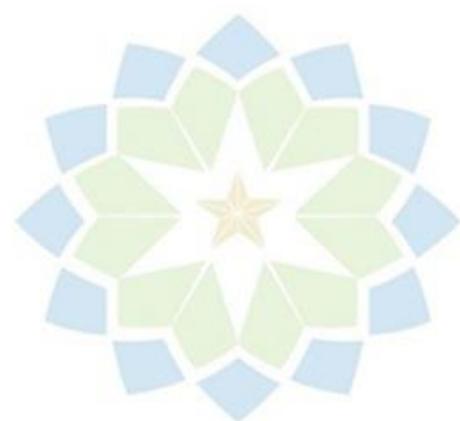
individu melainkan merupakan tugas dan wewenang PSM itu sendiri. Pemberdayaan oleh PSM adalah proses peningkatan kemampuan, kesempatan dan kewenangan kepada PSM untuk menumbuhkan, mengembangkan dan memberdayakan, mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah desa.



Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG